



SUB BAGIAN HUMAS DAN TUKALAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang 25137 Tlp. 0751-40318 Fax 0751-40811, 40817

Koran		Hlm
Haluan	✓	1
Padang Ekspres		
Singgalang		
Posmetro		
.....		

Tahun : 2017		
Bulan		
Jan	✓	Jul
Feb		Ags
Maret		Sep
April		Okt
Mei		Nov
Jun		Des

Tanggal				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

TEMUAN BPK RI PERWAKILAN
SUMBAR DI DINAS PU

SPJ Fiktif Diperkirakan Rp45 Miliar

Tahun 2016, kita agak lemah dalam pengawasan, sehingga kasus penyalahgunaan anggaran rentan terjadi. Kita ingin, tahun 2017 tak ada lagi penyimpangan-penyimpangan."

HENDRA IRWAN RAHIM
Ketua DPRD Sumbar



PADANG, HALUAN — Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Munandar meminta semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membaca setiap laporan yang masuk dari anak buahnya. Jangan asal teken saja untuk menghindari penyelewengan. Seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumbar adanya dugaan Surat Pertanggungjawaban Fiktif (SPJ Fiktif) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang nilainya diperkirakan mencapai Rp45 miliar.

"Tak hanya Eselon II, Eselon III dan IV juga harus meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya. Baca setiap laporan yang masuk dengan cermat, jangan asal teken saja," ucap mantan Bupati Agam tersebut kepada Haluan di Gedung DPRD Sumbar, Selasa (10/1).

Disebut Aristo, setiap atasan di lingkungan SKPD harus terlibat mengawasi penggunaan anggaran karena kerja SKPD itu sifatnya satu kesatuan. Maka dari itu pengendalian pengawasan juga harus dilakukan bersama-sama. Selain oleh Eselon II, III dan IV, pengawasan oleh Inspektorat diminta turut berjalan.

Hal itu disampaikan Aristo menanggapi dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oknum ASN di Dinas PU Provinsi Sumbar pada APBD 2015 lalu. Dalam penggunaan anggaran, lanjut Aristo, semuanya harus jelas. Tak peduli angkanya kecil atau besar. Jika tak jelas dan transparan meskipun angkanya kecil, tetap saja melanggar aturan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV

SPJ Fiktif..... Dari Halaman 1

DPRD Sumbar, Saidal Mafiyudin menyebut, telah mendengar adanya dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh oknum staf dinas PU Sumbar yang kemudian jadi temuan BPK. Namun demikian, karena info resmi dari BPK belum masuk ke Komisi IV DPRD, Saidal mengaku tak mengetahui dengan pasti berapa jumlah dana yang diselewangkan. "Hanya saja, jika itu memang benar. Hukum harus ditegakkan, ini kan uang negara, tak bisa dibiarkan saja," ucapnya.

Dengan adanya kejadian ini, Saidal berpesan, kepada semua kepala SKPD dan seluruh jajarannya yang telah dipercaya mengelola anggaran, agar lebih berhati-hati ke depan.

"Sekarang ini pengawasan dan aturan yang diterapkan dalam penggunaan anggaran sangat ketat. Harus ada pertanggungjawaban untuk seluruh kegiatan yang dijalankan, karenanya kita harapkan kehati-hatian dari semua SKPD," ujarnya.

Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim juga mengatakan, untuk menghindari adanya eksekutif atau legislatif yang tersangkut penyalahgunaan anggaran pada 2017 sekarang, pengawasan akan ditingkatkan.

"Tahun 2016, kita agak lemah dalam pengawasan, sehingga kasus penyalahgunaan anggaran rentan terjadi. Kita ingin, tahun 2017 tak ada lagi penyimpangan-penyimpangan. Karena itu pengawasan akan ditingkatkan," ujar Hendra, saat jumpa pers dengan wartawan, Jumat (30/12) lalu.

Hal yang sama diungkapkan Pamong Senior, Rusdi Lubis. Menurutnya, munculnya kasus ini disebabkan lemahnya pengawasan internal. Dimana pimpinan terlalu percaya kepada bawahan, sehingga kepercayaan ini malah disalahgunakan.

"Seharusnya pimpinan tidak boleh terlalu percaya dengan bawahan. Tetap jeli dan harus awas dengan apa pun yang dilakukan bawahan. Kalau sudah seperti ini pimpinan tentu juga harus bertanggung jawab," katanya kepada Haluan Senin (9/1), di Padang.

Rusdi melihat, kejadian ini sebenarnya harus menjadi pintu masuk pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan, mengingat hal seperti ini bisa saja juga dilakukan di SKPD lainnya di lingkungan Pemrov Sumbar.

"Intinya pimpinan harus awas. Dan 'pengawasan malaikat' harus diperkuat. Jangan sampai malah adanya kongkalikong antara atasan dan bawahan. Inspektorat juga harus awas," ujarnya.

Dilubungi terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Arkadius Di. Intan Bano, menyebutkan, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan dengan anggaran yang besar. Mengingat selama ini DPRD hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan eksekutif.

"Makanya kita telah minta ke BPK agar kita juga dapat melakukan pengawasan kepada pelaksanaan kegiatan tidak hanya

pada tataran kebijakan. Karen memang sesuai dengan arah kebijakan DPRD Sumbar 2017 fokus pada pengawasan disamping menyelesaikan Perda (Peraturan Daerah)," ungkapnya.

Terkait dengan besaran temuan BPK RI perwakilan Sumba Arkadius menyebutkan, tidak mengetahui pasti. Namun, lanjutnya dari informasi yang beredar besarannya cukup signifikan. "Ya informasi yang saya dengar itu Rp45 miliaran," paparnya kepada Haluan kemarin.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar menemukan penyelewengan uang negara mencapai angka puluhan miliar rupiah. Penyelewengan tersebut diduga dilakukan oleh oknum staf Dinas PU dengan inisial JSN. Bertugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di dinas tersebut.

Sekretaris Daerah Pemrov Sumbar Ali Asmar saat menerima laporan dari BPK pihaknya langsung bergerak untuk memanggil yang bersangkutan termasuk pimpinannya untuk dimintai keterangan.

Ali Asmar juga menuturkan setelah dipanggil yang bersangkutan mengakui bahwa penyelewengan tersebut dilakukannya; hanya sendiri dengan modus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif. Dengan memperbanyak, dan menambah laporan SPJ ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek jalan Samudera dan pembebasan lahan pembangunan fly over di Kota Padang dari dana APBI 2015. (h/len/lsr)